

Judul : Pemerintah Dinilai tak Serius Bahas RUU Minol
Tanggal : Senin, 05 Februari 2018
Surat Kabar : Republika
Halaman : 2

Pemerintah Dinilai tak Serius Bahas RUU Minol

● RR LAENY SULISTYAWATI

JAKARTA – Pemerintah dinilai tidak serius membahas Rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol (RUU Minol). Anggota Pansus RUU Minol dari Fraksi PAN Kuswiyanto mengaku prihatin dengan sikap pemerintah. Alasannya, setiap kali diundang pemerintah tidak hadir dalam rapat.

"Sikap pemerintah akan menghambat proses pembahasan, sehingga perkembangan RUU tersebut berjalan tidak baik," kata Kuswiyanto di Jakarta, akhir pekan lalu.

Kuswiyanto menganggap, efek tidak kooperatifnya pemerintah dalam pembahasan membuat berlari-larut, sehingga berpotensi buntu. Menurut dia, terlalu banyak yang sudah dirugikan dengan tidak adanya regulasi yang tegas ini.

"Terus terang, saya prihatin karena sampai hari ini belum ada kemajuan yang signifikan. Harapan saya harus ada dua persepsi, pertama dari pihak pemerintah dan kedua dari anggota dewan," katanya.

Kuswiyanto pun meminta kepada lintas kementerian untuk perlu penyelarasan persepsi

antarkementerian, yakni Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Agama, dan Kementerian Perindustrian.

Dia menambahkan, RUU Minol yang sudah berjalan sejak 26 Mei 2016 tidak kunjung selesai. Padahal, sejumlah kalangan mendesak DPR dan pemerintah untuk menuntaskan pembahasan regulasi minuman keras tersebut.

Hal serupa juga dikemukakan oleh anggota Pansus RUU Minol Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih. Dia mendesak pemerintah untuk kooperatif membahas aturan krusial ini bersama

dengan DPR. "Pansus RUU Minol ini mengalami hambatan karena pihak eksekutif (pemerintah), beberapa kali tidak bisa hadir dalam rapat dengan Pansus RUU Minol di DPR," ucapnya.

Pembahasan RUU Minol juga mengalami hambatan soal nomenklatur penamaan judul. Fraksi yang setuju menggunakan nomenklatur "larangan" adalah Fraksi PPP, Fraksi PKS, dan Fraksi PAN. Fraksi yang setuju menggunakan nomenklatur "pengendalian dan pengawasan" adalah Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi Hanura, dan

Fraksi Nasdem. Adapun fraksi yang mengusulkan judul tanpa embel-embel "larangan" dan "pengendalian dan pengawasan" adalah Fraksi Golkar dan Fraksi PKB.

Kepala Biro Hukum Kemenkes Sundoyo Hukor membantah tuduhan yang menyatakan Kemenkes selalu absen dalam pembahasan RUU Minol. Menurut Sundoyo, Kemenkes selalu mengikuti pembahasan RUU Minol di DPR. Pejabat Kemenkes yang hadir berasal dari Direktorat Kesehatan Jiwa yang didampingi biro hukum. Biro hukum, kata dia, biasanya men-

dampingi untuk penyusunan norma-normanya, *drafting* hingga harmonisasi dengan peraturan bidang kesehatan yang lain.

"Jadi, kami selalu hadir. Yang hadir kalau bukan eselon II ya eselon III (Kemenkes) saat di pembahasan RUU Minol ujarnya saat dihubungi *Republika*, Ahad (4/2).

Saat ini, kata dia, pembahasan terus berjalan, tapi masih terdapat kendala mengenai kesepakatan antarkementerian mengenai kedarminol. "Ini yang jadi perdebatan," katanya.

■ febrianto adi saputro ed: eh ism